

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA KUPANG

Jielqin Funai
NPP. 32.0656

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Kebijakan Publik
Email: 32.0656@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Andi Pitono. S.sos MSi

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): the problem that underlies the researcher to take this title is the suboptimal collaborative government in implementing the One Data Indonesia policy in Kupang City. **Purpose:** The objective of this study is to analyze collaborative government in implementing the One Data Indonesia policy in the City. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of in-depth interviews, direct observation, and documentation studies from related agencies using the theory of government collaboration by Ansell and Gash in 2008. **Results/Findings:** the study shows that collaboration between actors is still formal and does not reflect strong integration, although there are various positive initiatives such as increasing understanding between actors, developing information systems, and preparing supporting regulations to strengthen synergy. **Conclusion:** This study concludes that the success of the implementation of the One Data Indonesia policy is highly dependent on the effectiveness of cross-sector collaboration, clear regulatory support, and readiness of resources and infrastructure. For this reason, strategic steps are needed to strengthen coordination, build trust between stakeholders, and optimize the use of information technology as a means of sustainable data integration. **Keywords:** Collaborative, One Data Indonesia, Kupang City, Public Policy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah belum optimalnya kerjasama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja sama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi dari instansi terkait dengan menggunakan teori kolaborasi pemerintahan milik ansell dan gash tahun 2008. **Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor masih bersifat formal dan belum mencerminkan integrasi yang kuat, meskipun terdapat berbagai inisiatif positif seperti peningkatan pemahaman antar aktor, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan regulasi pendukung untuk memperkuat sinergi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi yang jelas, serta kesiapan sumber daya dan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi,

membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana integrasi data yang berkelanjutan.

Keywords: Kerjasama, satu data Indonesia, Kota Kupang, Kebijakan Publik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era digital telah membawa revolusi teknologi yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Kita tengah berada di era transformasi digital, di mana sensor dan perangkat *Internet of Things* (IoT) tersebar luas dan memungkinkan pengumpulan data dari hampir setiap aspek aktivitas individu maupun mesin yang terhubung secara digital (Berges et al., 2021). Data kini menjadi aset yang sangat berharga, bahkan lebih penting daripada minyak, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Volume dan peran data yang semakin meningkat memengaruhi keberhasilan perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah (Mantik et al., 2023). Namun, dengan ledakan data yang sangat besar, yang dikenal dengan istilah *big data*, tantangan utama adalah bagaimana mengelola data tersebut agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 58 Tahun 2002, pemerintah sebagai penyelenggara yang sah dan diatur oleh hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat (Tando et al., 2020). Manajemen pemerintah harus mampu menyatukan perspektif dan kepentingan yang berbeda (Huridi et al., 2021). Dalam proses *governance* terdapat 3 aktor yang berpengaruh yaitu: pemerintah, swasta dan Masyarakat (Zulhadi et al., 2023), ketiga aktor ini harus berkerja sama untuk mewujudkan tata kelola data yang baik agar data yang tersebar tidak menghambat proses pengambilan keputusan dan tidak menyebabkan pemborosan sumber daya (Yulfitri, 2020). tanpa tata kelola yang tepat, data yang terdistribusi di berbagai instansi pemerintah akan sulit diakses dan tidak terintegrasi dengan baik. Presiden Joko Widodo menyoroti adanya 27 ribu aplikasi di instansi pemerintah yang tidak terintegrasi. Ia menegaskan perlunya penghentian praktik penambahan aplikasi baru setiap pergantian kepala daerah guna mencegah tumpang tindih dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. (Sugiarto, 2024), Hal ini berisiko pada kegagalan kebijakan serta ketidakakuratan informasi yang dapat menghambat efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data pemerintah guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan efisien.

Pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kota Kupang, implementasi SPBE dan SDI masih menghadapi kendala dalam hal integrasi data antar instansi. Berbagai aplikasi dan sistem yang tidak sinkron mengakibatkan tumpang tindih dalam pengelolaan data, yang berdampak pada kualitas layanan publik dan pengambilan kebijakan. Pemerintah Kota Kupang sudah berusaha meningkatkan layanan melalui berbagai aplikasi dan website, namun data dari berbagai dinas masih terpisah dan belum terintegrasi dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola data di tingkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada permasalahan dimana pemerintah pusat telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) namun kenyataannya pelaksanaan di tingkat daerah, khususnya di Kota Kupang, masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya

integrasi antar sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi data, fragmentasi informasi, dan rendahnya akurasi data yang digunakan untuk perumusan kebijakan.

Lebih lanjut, masih terbatasnya penelitian yang memfokuskan pada *collaborative governance* sebagai pendekatan utama dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat kota juga menjadi celah dalam literatur akademik. Padahal, keberhasilan tata kelola data sangat bergantung pada koordinasi, partisipasi, dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk antar dinas di pemerintah daerah. Studi-studi yang ada cenderung berfokus pada aspek teknis atau infrastruktur digital, tanpa menyoroti aspek kolaboratif yang sangat penting dalam menyatukan visi, mekanisme kerja, serta pemanfaatan data yang terintegrasi.

Kesenjangan lain yang muncul adalah minimnya analisis empiris terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah yang memiliki kompleksitas geografis dan administratif tinggi seperti Kota Kupang. Sebagai ibu kota provinsi sekaligus daerah otonom yang terdiri dari banyak dinas, Kota Kupang menghadapi tantangan khusus dalam menyatukan data dari berbagai sektor. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana kolaborasi antara instansi dilakukan, apa saja hambatannya, dan bagaimana strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasinya. Padahal, studi semacam ini penting untuk memberikan gambaran realistis terhadap kesiapan daerah dalam mendukung agenda transformasi digital nasional.

Terakhir, rendahnya nilai indeks SPBE Kota Kupang dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan digital antar daerah. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mendokumentasikan kebijakan yang ada, tetapi juga mengeksplorasi dinamika kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai *collaborative governance* dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian akademik, serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan tata kelola data di tingkat daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu Penelitian Ni Luh Yulyana Dewi, berjudul *Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik* (Luh & Dewi, 2019). menemukan bahwa Kompleksnya hubungan antara aktor dalam kebijakan publik melahirkan konsep baru yang dinamakan *collaborative governance*. Penelitian Mahmud menunjukkan ketidaksiapan atau keterbatasan pemerintah Provinsi Banten dalam memanfaatkan big data secara luas disebabkan oleh faktor Penghambat (Mahmud et al., 2022). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian (Cide, 2017) Perbedaan utama terletak pada fokus dan kedalaman teoritis, di mana penelitian (Cide, 2017) menitik beratkan pada analisis konseptual hubungan antara proses kolaboratif dan rutinitas birokrasi secara mendalam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan praktis model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang. Perbedaan lainnya juga ditemukan dalam penelitian (Mantik et al., 2023) yang menggunakan kerangka delapan aspek kesiapan untuk memetakan masalah dan merumuskan strategi implementasi dalam penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* untuk menganalisis efektivitas kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.

Penelitian Brian Amy Prastyo menemukan Perpres Satu Data Indonesia, Peraturan presiden, SDI dan Peraturan Presiden Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut berpotensi tidak efektif (Prastyo, 2024). Penelitian Prasetya selanjutnya berkaitan dengan Tantangan Implementasi Satu Data di Pemerintah Daerah Kabupaten (Studi kasus Kabupaten Ciamis) menemukan bahwa menemukan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Ciamis (Prasetya et al., 2022) . Berdasarkan hasil penelitian Amalia tentang Dekonstruksi Kebijakan Publik masa kini melalui eksalasi kualitas Satu Data Indonesia antara harapan dan kenyataan, penulis menemukan bahwa Pentingnya ekskalasi satu Data Indonesia harus mempertimbangkan perubahan mendasar, seperti Peningkatan sumber daya manusia, partisipasi dan penguatan kolaboratif. hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang klaboratif, yang juga akan mendorong terjadinya era rekonsiliasi antara kekuasaan politik dan kekuasaan pengetahuan (Amalia Putri, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Urgensi penelitian ini berada pada pentingnya menjembatani celah antara teori dan pelaksanaan tata kelola kolaboratif. Seiring dengan tren global yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan model tata kelola yang inovatif guna menjaga daya saing (Parlina et al., 2024). Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni *Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang, perbedaannya pada teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* milik Ansell dan Gash tahun 2008, serta fokus serta tempat dimana penilitian ini dilakukan di Kota Kupang. Dari Penelitian sebelumnya menemukan bahwa terjadi berbagai dinamika kebijakan baru ini serta melihat bahwa pentingnya kebijakan ini untuk di laksanakan, penelitian dari metode oprasional hingga strategi yang diterapkan oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia terutama di Kota Kupang

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang.

II. METODE

Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur sistematis dari asumsi umum hingga metode rinci untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell. Jhon W, 2014). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap suatu kompleksitas persoalan (Sugiyono, 2013) Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, serta Pejabat Badan Pusat Statistik Kota Kupang. Penulis juga melakukan wawancara dengan Pejabat Perangkat Daerah Sumber Data yaitu Kepala Bidang lalu lintas dan Angkutan jalan Dinas Perhubungan Kota Kupang, serta Pejabat akun maneger dan data analis Telkom sebagai Pihak swasta yang bekerja sama dengan Dinas komunikasi dan Informatika dalam membangun portal Satu Data Kota Kupang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kerja sama dalam penyelenggaraan Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang menggunakan teori dari *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa *Collaborative Governance* dapat berjalan berdasarkan empat dimensi yaitu Kondisi awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaboratif. Teknik kolaboratif melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan yang sama, tetapi implementasi terhambat oleh perbedaan tujuan, kepentingan, dan tanggung jawab (Valentina et al., 2025). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kondisi Awal

Penulis menganalisa menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell Gass kemudian mengembangkan analisisnya melalui 4 dimensi yang dimiliki yaitu, Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi (Ansell & Gash, 2008)

Dimensi awal terdiri dari indikator ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, pada pelaksanaan di Kota Kupang menunjukkan adanya *Collaborative Governance* yang diawali dengan ketimpangan sumber daya atau kekuasaan antar pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Kupang, integrasi data dari berbagai perangkat daerah dilakukan sesuai tupoksi masing-masing. Dari wawancara dengan Kepala Bappeda, Djidja Kadiwanu, dan Kepala Dinas Kominfo, Ariantje M. Baun, diketahui bahwa Forum Satu Data terdiri dari 31 anggota dari berbagai instansi, termasuk koordinator, wali data, pembina, dan penghasil data. Struktur ini mencerminkan pembagian kewenangan yang berbeda namun saling mendukung. Meski sarana prasarana seperti komputer dan jaringan dianggap cukup, masalah utama terletak pada SDM dan keterbatasan anggaran. Kominfo menyampaikan bahwa masih kekurangan tenaga ahli statistik, dan anggaran 2025 sebesar Rp35 juta untuk tiga seksi dinilai sangat terbatas. Pernyataan serupa disampaikan oleh BPS dan Dinas Perhubungan, meskipun mereka menyatakan fasilitas dasar untuk memasukkan data sudah memadai. Perbedaan kapasitas ini justru mendorong kerja sama yang saling melengkapi, sejalan dengan teori Ansell dan Gash bahwa tata kelola kolaboratif memerlukan strategi untuk mengelola ketimpangan sumber daya.

Indikator kedua adalah insentif bagi pemangku kepentingan, insentif sangat penting untuk mendorong partisipasi dan komitmen. Namun, dari wawancara dengan Yohanes Resi Ojan dari Dinas Perhubungan, disimpulkan bahwa insentif belum tersedia. Tugas memasukkan data masih dianggap sebagai tambahan, sehingga indikator ini belum terwujud dalam implementasi kebijakan. Sedangkan Riwayat konflik atau kerja sama pelaku antar kepentingan penulis menemukan bahwa kerja sama antar lembaga telah dilakukan sebelumnya, misalnya dalam penyusunan RPJP dan Musrenbang. Kepala Bappeda menyatakan bahwa data dari perangkat daerah digunakan untuk menyusun perencanaan dan menyiarkan program tahunan. Menurut Dinas Kominfo, meski sering terjadi perbedaan pandangan dan keterlambatan pengiriman data, hal ini belum tergolong konflik serius, melainkan dinamika kerja sama yang masih bisa diatasi secara internal.

3.2. Desain Kelembagaan

Penulis melakukan analisis mengenai Dimensi Kelembagaan dari kolaboratif yang dilakukan pemerintahan dalam pelaksanaan program Satu Data Indonesia di Kota Kupang. Desain kelembagaan

menekankan pada prosedur legitimasi yang diwujudkan melalui regulasi yang terbuka dan transparan. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Kupang telah memiliki dasar hukum yang kuat, dimulai dari Perpres No. 39 Tahun 2019, Pergub NTT No. 64 Tahun 2020, hingga Perwal Kupang No. Penjelasan dari Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang menegaskan bahwa seluruh aturan dan pembagian tugas telah diatur secara jelas dan lengkap di dalam Forum Komunikasi, terdapat dua jenis forum komunikasi: formal dan nonformal. Forum formal berupa diskusi terbuka yang melibatkan tenaga ahli data, sedangkan forum nonformal berbentuk grup *WhatsApp* yang digunakan oleh operator dari berbagai perangkat daerah. Forum ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Informasi dari Telkom dan Bappeda Kota Kupang mengonfirmasi bahwa grup *WhatsApp* sangat membantu dalam membahas permasalahan teknis dan berbagi informasi secara praktis. Hal ini menunjukkan bahwa forum komunikasi telah berjalan efektif dan mendukung kolaborasi yang aktif.

Partisipasi inklusif dalam kolaborasi menjamin semua pihak memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama. Desain kelembagaan yang inklusif terlihat dari keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam forum komunikasi, seperti grup *WhatsApp* Satu Data Kota Kupang yang mencakup 37 anggota sesuai dengan SK Wali Kota Kupang No. 84 Tahun 2024. Selain itu, partisipasi juga tampak dari keikutsertaan perangkat daerah dalam pelatihan/bimbingan teknologi oleh Bappeda, meskipun baru 17 dari 31 instansi (54%) yang berpartisipasi. Partisipasi lebih lanjut terlihat pada pengisian data di Portal Satu Data Kota Kupang, namun masih banyak instansi yang belum aktif menginput data. Kepala Dinas Kominfo mengakui masih ada hambatan dan perlunya upaya untuk mendorong partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator partisipasi inklusif belum optimal.

Proses transparansi merupakan aspek penting kolaborasi, ditampilkan melalui pengembangan data portal (<https://bigview.bigbox.ai/>) oleh Pemkot Kupang bekerja sama dengan Telkom. Portal ini menyediakan akses data ke perangkat daerah. Namun, data publik masih disaring oleh Diskominfo. Pernyataan dari pihak Bappeda, Diskominfo, dan Telkom menunjukkan bahwa keterbukaan masih terbatas untuk publik. Oleh karena itu, proses transparansi indikator juga belum sepenuhnya selesai. Berdasarkan analisis indikator desain kelembagaan dalam *Collaborative Governance* yang diselenggarakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Dua indikator menunjukkan kemajuan, sementara dua lainnya masih menghadapi hambatan.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Indikator Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi kepemimpinan fasilitatif, hal ini menjelaskan kemampuan mengelola tim dengan mendorong partisipasi aktif. Dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Kupang, Bappeda berperan sebagai Pembina Data sekaligus Koordinator Forum Satu Data. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kota Kupang, mereka menyatukan masukan data perangkat daerah, menyatukan kemajuan kerja, dan mengatasi kendala teknis bersama Kominfo dan Statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda sudah menjalankan peran fasilitator secara efektif. Namun, Kepala BPS Kota Kupang, Patrisius Tupen, menyatakan bahwa kolaborasi sering terhambat oleh kurangnya anggaran dan partisipasi dari perangkat daerah. Meskipun demikian, BPS tetap memberikan pelatihan dan menetapkan target tahunan. Kesimpulannya, kolaborasi manajemen berjalan, meski koordinasi masih terkendala anggaran.

Pengelolaan Kemampuan Melaksanakan Kredibilitas Teknis merupakan indikator kedua dari dimensi Kepemimpinan fasilitatif, dimana kemampuan pimpinan dalam memastikan anggota tim

mampu menjaga kredibilitas. BPS dan Diskominfo Kota Kupang melakukan berbagai pertemuan dan pelatihan teknis untuk data operator. Diskominfo juga memberikan bimbingan teknis secara langsung. Patrisius Tupen menambahkan meskipun anggaran terbatas, FGD dan evaluasi EPSS tetap dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai standar. Pelatihan dilakukan berdasarkan prioritas yang ditentukan dari hasil EPSS. Upaya peningkatan kemampuan teknis memang ada, namun masih perlu ditingkatkan agar kredibilitas data lebih optimal.

Indikator terakhir adalah memberdayakan kolaborasi untuk keputusan yang kredibel, dalam prinsip Satu Data, setiap perangkat daerah diberi izin menentukan data target masing-masing. Kepala bidang lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Kupang menjelaskan bahwa mereka menginput data operasional seperti jumlah kendaraan dan titik CCTV secara mandiri. Kebebasan ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap perangkat daerah dalam mengambil keputusan data. Indikator ini sudah berjalan baik dan menunjukkan keberhasilan dalam aspek kolaborasi untuk keputusan yang kredibel. Dari tiga indikator kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi, hanya satu yang telah optimal, yaitu pemberdayaan kolaborasi untuk pengambilan keputusan yang kredibel. Dua lainnya — manajemen proses kolaborasi dan pengelolaan kemampuan teknis — masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi dan sumber daya.

3.4. Proses Kolaboratif

Dialog Komunikasi Tatap Muka (*Face to Face*) Pertemuan langsung berperan penting dalam membangun kepercayaan, pemahaman bersama, serta komitmen. Dalam pelaksanaan program Satu Data di Kota Kupang, diskusi langsung seperti sosialisasi dan pelatihan statistik sektoral telah dilakukan. Hal ini menjadi bentuk awal kolaborasi dan dinilai telah berhasil memenuhi indikator komunikasi langsung dalam kerangka *Collaborative Governance*. Pada indikator Membangun Kepercayaan, Kepercayaan penting untuk kelancaran kolaborasi. Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala Diskominfo Kota Kupang, kepercayaan antar dinas masih rendah. Pengumpulan data sulit dilakukan karena masih ada keraguan terhadap sentralisasi data. Akibatnya, keterlibatan aktor dalam portal Satu Data menjadi kurang aktif, menunjukkan indikator ini belum tercapai dan memerlukan perbaikan jangka panjang.

Komitmen terhadap Proses, Komitmen diperlukan untuk menjaga kesinambungan program. Kepala BPS Kota Kupang menyebutkan bahwa BPS dan Diskominfo telah berupaya mengajak OPD berpartisipasi. Namun, masih banyak produsen data yang belum memahami pentingnya peran mereka, sehingga beberapa data belum tersedia di portal. Hal ini menunjukkan komitmen kolaborasi belum optimal. Terkait Saling Memahami, Efektivitas kolaborasi memerlukan pemahaman bersama atas tujuan dan peran. Berdasarkan Perwali No. 19 Tahun 2024 dan wawancara dengan Bappeda dan Diskominfo, pembagian peran sudah jelas dan ada saling melengkapi. Indikator yang terakhir yaitu Hasil Sementara, Portal Satu Data Kota Kupang telah tersedia dan mulai terisi data. Namun, masih banyak data yang belum diinput karena ego sektoral antar perangkat daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program satu data Kota Kupang juga merupakan salah satu sarana penyatuan data dan informasi. Penulis menemukan temuan penting yakni menjadi landasan digital dalam rangka efisiensi kolaborasi yang baik, Kebijakan ini. Pelaksanaan kerjasama Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan satu data Indonesia di Kota Kupang merupakan proses kerja sama yang kompleks yang melibatkan berbagai Dinas dan lembaga sehingga terjadi banyak dinamika, dibutuhkan kerjasama yang baik meliputi tujuan, struktur interaksi dan proses, Sama halnya dengan temuan Dewi bahwa Kompleksnya

hubungan antara aktor dalam kebijakan publik melahirkan konsep baru yang dinamakan *collaborative governance*, *collaborative governance* adalah proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak melintasi batas-batas organisasinya. Dibutuhkan tujuan, struktur, interaksi dan proses dimana Nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan public(Luh & Dewi, 2019).

Layaknya Kebijakan lainnya, satu data Kota Kupang ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah konsistensi, pemanfaatan, dan kepercayaan, salah satunya dikarenakan oleh keterbukaan akses dimana portal satu data Kota Kupang masih belum bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat serta ketersediaan data juga belum optimal di karenakan terdapat beberapa dinas yang belum memasukan data, berbeda dengan temuan Mahmud pada pelaksanaan satu data Provinsi Banten yaitu saat diakses, masih ada birokrasi sistem yang membatasi sehingga tidak semua pengguna dapat mengaksesnya. Demikian pula, data yang disajikan masih merupakan data rutin dari pejabat daerah, bukan dalam konteks pelayanan publik untuk masyarakat di Provinsi Banten (Mahmud et al., 2022) selanjutnya terdapat kekuatan dan kelemahan yang ditemukan penulis dalam satu data Kota Kupang ini sama dengan apa yang ditemukan Prasetya di Kabupaten Ciamis yaitu menunjukkan bahwa kekuatan, kelemahan paling utama dalam implementasi SDI diantaranya adalah : kekuatan yaitu faktor regulasi dan teknologi; kelemahan yaitu faktor sumber daya manusia, pendanaan, ego sectoral(Prasetya et al., 2022)

Adanya kebijakan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu menjadi landasan perencanaan berbasis data yang akurat sehingga kedepannya dapat mewujudkan berbagai kebijakan yang efisien dan efektif, yang pada akhirnya melalui kerjasama dari semua pihak akhirnya mampu memajukan bangsa. Perubahan ini juga perlu diarahkan pada transformasi mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan partisipasi, serta penguatan kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Dengan adanya perubahan-perubahan mendasar ini, secara bertahap negara akan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bersifat kolaboratif, yang pada akhirnya juga dapat mempertemukan kekuasaan politik dengan kekuatan pengetahuan. Hal ini akan mendorong terciptanya sistem kebijakan dan manajemen publik yang lebih efektif dan berkualitas (Amalia Putri, 2022).

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Kupang menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan Satu Data Kota Kupang, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman statistik, ego sektoral, serta kurangnya koordinasi antar instansi, swasta, dan masyarakat. Meskipun portal Satu Data telah dibentuk melalui kerja sama antara Bappeda, BPS, Diskominfo, dan Telkom, implementasinya masih perlu ditingkatkan dalam hal konsistensi, pemanfaatan, dan kepercayaan antar produsen data. Perbaikan pada faktor-faktor penghambat ini penting agar Satu Data Kota Kupang dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya meneliti di satu produsen data saja dari 29 produsen data yang tersedia di Kota Kupang, yaitu Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih Kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Putri, R. (2022). *DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK MASA KINI MELALUI ESKALASI KUALITAS SATU DATA INDONESIA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Berges, I., Ramírez-Durán, V. J., & Illarramendi, A. (2021). A Semantic Approach for Big Data Exploration in Industry 4.0. *Big Data Research*, 25. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100222>
- Cide, C. L. M. (2017). *Collaborative governance: beyond mere participation*.
- Creswell, Jhon W. (2014). *Research Design*. (4th ed.). SAGE Publication.
- Huridi, M. H., Hadi, A. R. A., & Hashim, M. H. (2021). Participatory Planning in Collaborative Governance Perspective in Banyumas Regency, Central Java Province, Indonesia. *Croatian International Relations Review*, 27(87), 95–111. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2021-0004>
- Luh, N., & Dewi, Y. (2019). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK*. 3(Collaborative). <https://journal.undiknas.ac.id>
- Mahmud, T. A., Myrna, R., Rusli, B., & Sumaryana, A. (2022). Service Quality of Satu Data in Banten Province, Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10596>
- Mantik, J., Firmansyah, A. D., & Susanto, T. D. (2023). The unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) implementation: a lesson learned from local government. In *Jurnal Mantik* (Vol. 7, Issue 1). Online.
- Parlina, R., Simangunsong, F., & Haposan, T. (2024). *Collaborative Governance in Increasing Original Regional Income*. <https://ijebss.ph/index.php/ijebss>
- Prasetya, W. S., Fauzi, A. A., Taufiq, O. H., Garvera, R., & Arifin, S. (2022). *TANTANGAN IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS KABUPATEN CIAMIS)*.
- Prastyo, B. A. (2024). Pengaturan Tata Kelola Big Data Untuk Sinkronisasi Penerapan Satu Data Indonesia Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Soedirman Law Review*, 5(4), 1–24. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16046>
- Sugiarto, E. C. (2024, October 14). *Optimalisasi Peran Pemerintah di Era Digital PR Melalui INA Digital*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalisasi_peran_pemerintah_di_era_digital_pr_melalui_ina_digital
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF R & D*. Penerbit Alfabeta,.
- Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2020). Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: A Systematic Mapping Study. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 18(2), 144–163. <https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.144-163>

- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Salsabila, L. (2025). Collaborative Governance in Handling the Waste Crisis: A Systematic Literature Review. In *International Journal of Sustainable Development and Planning* (Vol. 20, Issue 2, pp. 761–770). International Information and Engineering Technology Association. <https://doi.org/10.18280/ijmdp.200225>
- Yulfitri, A. (2020). Analisis Data Governance Maturity Menggunakan Stanford Data Governance Maturity Analysis of Governance Maturity Data Using Stanford Data Governance Maturity. *Sains Dan Teknologi Terapan*, 1(2).
- Zulhadi, Pitono, A., & Wargadinata, E. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.

